



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS DAN BPWS)**

Tahun Sidang : 2017 – 2018
Masa Sidang : IV
Rapat : Ke -
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Hari/Tanggal : Rabu, 21 Maret 2018
Sifat : Terbuka
Pukul : 13.45 WIB s.d 18.20 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V),
Gedung Nusantara DPR RI
Acara : Membahas Mengenai Insiden dan Kecelakaan Konstruksi yang
terjadi pada Proyek Strategis Nasional.
Ketua Rapat : Ir. Fary Djemy Francis, MMA
Sekretaris : Dra. Prima MB. Nuwa, Msi
Hadir Anggota : dari 50 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta jajaran
terkait lainnya.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 13.45 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada hari ini adalah membahas mengenai insiden dan kecelakaan konstruksi yang terjadi pada Proyek Strategis Nasional..
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.../Hal.2

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI menyatakan keprihatinan yang mendalam terhadap banyaknya kecelakaan pekerjaan konstruksi, dan jatuhnya korban jiwa, namun demikian Komisi V DPR RI juga memberikan apresiasi terhadap Kementerian PUPR terkait dengan langkah-langkah yang diambil dalam menindaklanjuti kecelakaan pekerjaan konstruksi.
2. Komisi V DPR RI mendesak Kementerian PUPR untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang konstruksi dan meningkatkan mekanisme pengawasan terhadap Penyedia Jasa Konstruksi untuk selalu memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pekerjaan konstruksi.
3. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk meningkatkan koordinasi lintas sektoral terkait pemenuhan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sehingga kejadian kecelakaan pekerjaan konstruksi tidak terjadi dimasa mendatang.
4. Komisi V DPR RI meminta Komite Keselamatan Konstruksi (K3) melalui Kementerian PUPR untuk menyampaikan laporan hasil evaluasi kecelakaan pekerjaan konstruksi kepada Komisi V DPR RI segera setelah dinyatakan selesai.
5. Untuk lebih memberdayakan penyedia jasa konstruksi nasional, Komisi V DPR RI menghimbau kepada pemerintah terhadap pekerjaan konstruksi yang bernilai dibawah Rp.100 Miliar, agar dapat dilaksanakan oleh pihak swasta kecuali pekerjaan-pekerjaan khusus atau yang memerlukan teknologi tinggi.
6. Terkait dengan usulan untuk pembentukan Panitia Kerja (Panja), Komisi V DPR RI akan mendalaminya lebih lanjut di dalam Rapat Intern.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.20 WIB.

Jakarta, 21 Maret 2018

**MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,**



M. BASOEKI HADIMOELJONO

KETUA RAPAT,



FARY DJEMY FRANCIS